

PEMBERDAYAAN PELAKU UMKM MENUJU UMKM UNGGUL MELALUI PENGUATAN PAJAK

Laily Muzdalifah¹⁾, Ayu Lucy Larassaty²⁾, M. Mustaqim³⁾, Edita Rachma Kamila⁴⁾

¹ Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo
e-mail: laily_muzdalifah.mnj@unusida.ac.id

^{2,3,4} Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo
e-mail: larassaty.mnj@unusida.ac.id, mmustaqim.mnj@unusida.ac.id,
edita402.mnj@unusida.ac.id

Abstract

The purpose of this activity is to empower MSME's actors in the Sidoarjo PC Fatayat NU Association in socializing and making NPWPs for MSME's actors. The activities carried out are training in nature. The number of participants who attended the activity was 47 participants. The speakers invited to the event were from DJP East Java 2. The results of this activity were in the form of an understanding of MSME's actors in the PC Fatayat NU Sidoarjo Association regarding the importance of taxes and NPWP creation for MSME's actors. The results of the participant satisfaction survey with these activities indicated that the participants were very satisfied with these activities. Satisfaction is measured both in terms of the readiness of the committee, the readiness of resource persons and materials as well as the readiness of the activity location.

Keywords: Empowerment, MSME's, NPWP

Abstrak

Tujuan dari kegiatan ini sebagai bentuk pembedayaan pelaku UMKM di Asosiasi PC Fatayat NU Sidoarjo dalam hal sosialisasi dan pembuatan NPWP bagi para pelaku UMKM. Adapun kegiatan tersebut dilakukan bersifat pelatihan. Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan tersebut sebanyak 47 peserta. Adapun narasumber yang diundang pada acara tersebut dari DJP Jatim 2. Hasil dari kegiatan tersebut yakni berupa pemahaman para pelaku UMKM di Asosiasi PC Fatayat NU Sidoarjo terkait dengan pentingnya pajak dan pembuatan NPWP bagi para pelaku UMKM. Adapun hasil survey kepuasan peserta terhadap kegiatan tersebut bahwa peserta sangat puas dengan adanya kegiatan tersebut. Kepuasan tersebut diukur baik dalam hal kesiapan panitia, kesiapan narasumber dan materi serta kesiapan lokasi kegiatan.

Keywords: Pemberdayaan, UMKM, NPWP

1. PENDAHULUAN

Sidoarjo merupakan kota yang memiliki banyak UMKM. Sidoarjo juga merupakan disebut sebagai kota UMKM. Sidoarjo memiliki banyak keunggulan produk. UMKM unggul yang ada di Sidoarjo seperti UMKM tas dan kulit, aneka olahan bandeng, Kerupuk, petis dan sebagainya. PC Fatayat NU Sidoarjo merupakan salah satu organisasi ke-NU-an yang dimiliki oleh kabupaten Sidoarjo. Organisasi tersebut merupakan organisasi dari anggota NU yang ada di Sidoarjo yang mayoritas adalah Ibu-Ibu. Fatayat adalah badan otonom (banom) di bawah naungan Nahdlatul

Ulama (NU) untuk kalangan perempuan muda yang didirikan pada 7 Rajab 1369 H/24 April 1950 H. Kata Fatayat berasal dari bahasa Arab yang berarti pemudi. Masa perintisan Fatayat NU dimulai ketika NU menyelenggarakan Muktamar ke-15 di Surabaya pada tahun 1940[1].

Oleh karena banyak dari anggota dari PC Fatayat NU Sidoarjo yang memiliki usaha dan memiliki antuas yang cukup tinggi dalam menjalankan bisnis, akhirnya PC Fatayat NU Sidoarjo secara resmi membentuk Asosiasi UMKM yang diberi nama Asosiasi UMKM PC Fatayat NU Sidoarjo.

Untuk mengembangkan usaha masing-masing anggota Asosiasi UMKM PC Fatayat Sidoarjo untuk itu Universitas Sidoarjo melakukan kerja sama dalam hal melakukan pemberdayaan dan pembinaan. Salah satu pemberdayaan ini dilakukan dan dituangkan dalam pemberdayaan pada melalui penguatan terhadap Pajak. Kegiatan ini dilakukan berupa sosialisasi dan pembuatan praktik NPWP oleh para pelaku UMKM yang ada di Asosiasi UMKM PC Fatayat Sidoarjo.

Definisi dari UMKM adalah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang berperan sangat penting dalam mendukung perekonomian Rumah Tangga, Keluarga, Daerah maupun Nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan [2]. Definisi terbaru tentang UMKM tertuang pada PP RI nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa definisi UMKM yaitu a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai talangan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha[3].

Pelaku UMKM yang dimiliki oleh PC Fatayat Sidoarjo memiliki banyak usaha home industri seperti jamu, makanan ringan, warung kopi, jasa cuci sepeda motor dan bisnis kuliner yang lain. Untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan branding dimata konsumen, ijin usaha menjadi hal yang sangat penting. Ijin usaha awal yang bisa direalisasikan yakni NIB. NIB saat ini dapat diurus dengan mudah melalui website <https://oss.go.id/> . *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha[4]. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang menjadi payung hukum dari usaha yang resmi dan diakui oleh negara melalui Lembaga OSS atau dikenal dengan *Online Single Submission*[5]. Pembuatan NIB pun sangat mudah hanya dengan

memiliki KTP, NPWP, alamat email aktif dan nomor HP aktif.

NPWP yang merupakan syarat untuk kepengurusan NIB memiliki peran yang cukup penting. NPWP berfungsi menjadi tanda pengenal identitas bagi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya membayar pajak bagi negara. Pajak UMKM hanya 0,5% apabila peredaran Brutonya lebih dari 500juta per tahun[6]. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk dana pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia. Adanya sosialisasi dan pendampingan pembuatan NPWP ini diharapkan para pelaku dapat dengan mudah memahami pentingnya NPWP untuk kelangsungan usahanya dan memberikan kemudahan dalam mengurus NPWP. Adanya sosialisasi diharapkan para pelaku UMKM menjadi menyadari pentingnya pajak dan menjadi wajib pajak yang patuh akan pembayaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi[7]. Begitu pula dengan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mintje, (2016) secara simultan sikap, kesadaran, dan pengetahuan Kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu sosialisasi dan pendampingan pembuatan NPWP dianggap penting.

Pajak menjadi salah satu pendapatan bagi suatu Negara. Pendapatan pajak konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap aktivitas perekonomian[9]. Oleh karena itu kegiatan pendampingan ini menjadi penting bagi pelaku UMKM untuk memahami pentingnya NPWP bagi usahanya.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yakni berupa sosialisasi dan pendampingan pembuatan NPWP oleh Asosiasi UMKM PC Fatayat Sidoarjo. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu :

Tahap Perencanaan :

- Membuat rencana kegiatan sosialisasi dan pelatihan pembuatan NPWP oleh Asosiasi UMKM PC Fatayat Sidoarjo dengan mengajukan proposal kegiatan pada DJP (Direktorat Jendral Pajak) Jatim 2 dan Asosiasi PC Fatayat NU Sidoarjo.
- Mengajukan rencana lokasi kegiatan yang berada di kantor Graha Nusantara MWCNU

Buduran-Sidoarjo

- c. Merencanakan alokasi kebutuhan dana, jumlah peserta, alokasi waktu dan hasil kegiatan

Tahap Pelaksanaan :

- a. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 16 November 2022 bertempat di Graha Nusantara MWCNU Buduran. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 12.00 – selesai dengan jumlah peserta 47 peserta.
- b. Alokasi Waktu yang digunakan yakni 2 jam yang tercermin pada rundown pelaksanaan kegiatan berikut ini :

Tabel 1. Rrundown kegiatan

Waktu	Kegiatan	PIC
12.00-12.30	Registrasi Peserta	Anggota PAC Buduran dan panitia UNUSIDA
12.30 -13.00	Pembukaan dan sambutan	MC Acara
13.00–14.00	Materi sosialisasi dan pelatihan pembuatan NPWP secara online	DJP Jatim 2
14.00–14.30	Sesi Tanya jawab	Moderator
14.30-15.00	Penutup	MC Acara

- c. Evaluasi hasil kegiatan berupa pengisian kuesioner terhadap kepuasan. Kuesioner kepuasan tersebut diisi oleh peserta pelatihan. Adapun manfaat dari kuesioner tersebut adalah sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi panitia acara. Adapun kuesioner dibuat dengan menggunakan skala likert.

Adapun pihak-pihak yang memberi dukungan pada pelaksanaan pemberdayaan ini yaitu :

- a. Kantor DJP Jatim 2 sebagai narasumber pada acara kegiatan tersebut. Adapun narasumber dari kegiatan tersebut yaitu Bapak Arif.
- b. Asosiasi PC Fatayat NU Sidoarjo, khususnya PAC Fatayat Buduran.
- c. Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo.

3. HASIL

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada para pelaku usaha mikro Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta pelatihan melebihi jumlah peserta yang ditargetkan, target peserta yang direncanakan awal adalah 40 peserta. Pada kegiatan tersebut jumlah peserta yang hadir adalah 47 peserta. Hal ini menunjukkan minat yang tinggi dari para peserta untuk mendapatkan pengetahuan pentingnya memiliki NPWP bagi pelaku UMKM disamping para pelaku usaha dapat membuat NPWP secara online.
- b. Pada saat kegiatan berlangsung banyak peserta yang sangat antusias dengan adanya pelatihan pembuatan pembuatan NPWP secara online. Bagi para peserta yang selama ini sudah menjalankan usaha namun belum memiliki NPWP bisa langsung melakukan praktek kegiatan. Para pelaku UMKM tersebut memahami bahwa dengan adanya NPWP diharapkan bisnisnya akan semakin berkembang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mentoring dengan diberikan tahapan-tahapan secara rinci oleh narasumber. Disamping itu peserta juga dipandu oleh petugas dari DJP dalam pembuatan NPWP secara online.
- c. Setelah kegiatan pelatihan pembuatan NPWP ini, peserta semakin memahami cara membuat NPWP secara online yang mana diharapkan dapat NPWP yang sudah dimiliki dapat digunakan untuk kepengurusan NIB (Nomor Induk Bersusaha). Untuk membuat NPWP peserta dapat menggunakan HP dan laptop masing-masing peserta.
- d. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya NPWP digunakan untuk kepengurusan ijin yang lain seperti NIB. Hasil kegiatan tersebut terdapat 37 peserta yang telah berhasil mendaftarkan NPWP dan sisanya masih terkendala berkas yang tidak lengkap.
- e. Kuesioner ini dibuat dengan tujuan mengetahui kepuasan peserta dari kegiatan pemberdayaan ini. Setelah Adapun hasil dari kuesioner tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Survey Kepuasan Peserta

No	Pertanyaan Kuesioner	1	2	3	4	5
	Kesiapan panitia					
1	Waktu pelaksanaan sesuai jadwal					47
2	Pelayanan ramah dan memuaskan				40	7
	Kesiapan narasumber					

1	Narasumber menjelaskan materi dengan jelas dan baik				2	45
2	Media yang digunakan efektif			4	30	13
3	Peserta menerima copy materi dari narasumber					47
4	Kemampuan narasumber dalam menjawab pertanyaan jelas dan tepat				3	44
	Kesiapan Sapras					
1	Lokasi mudah dijangkau				4	39
2	Ruang kegiatan yang nyaman				5	38

Sumber : data diolah oleh peneliti

4. PEMBAHASAN

Memiliki identitas wajib pajak merupakan hal yang penting bagi para pelaku UMKM. Agar usaha berjalan dengan baik, usaha harus memiliki ijin usaha. Apalagi pengurusan legalitas usaha saat ini lebih sederhana, mudah dan cepat[10]. Untuk memiliki ijin usaha, syarat awal yang harus dimiliki adalah NPWP. Peserta wajib pajak yang tidak memiliki NPWP bisa juga disebabkan faktor karena belum mengerti dan memahami cara mengurus NPWP. Pelatihan menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman terkait NPWP pada pelaku UMKM[11].

Pada saat ini kepengurusan NPWP juga menjadi lebih mudah dan bisa dilakukan secara online. Target peserta pelatihan ialah 40 peserta ternyata jumlah peserta pelatihan yang hadir melebihi target yaitu sejumlah 47 peserta. Hal tersebut menunjukkan bahwa antusiasme peserta untuk mengetahui pentingnya NPWP bagi pelaku UMKM cukup tinggi. Sebelum pemberian materi pelatihan, terlebih dahulu diadakan tanya jawab dengan peserta berkaitan dengan beberapa materi pelatihan mengenai NPWP. Dari hasil Tanya jawab singkat yang dilakukan kepada peserta pelatihan, banyak peserta pelatihan yang sangat antusias. Banyak diantara peserta yang belum memahami arti penting NPWP dan cara pembuatan NPWP secara online.

Dalam pelatihan tersebut nara sumber menjelaskan arti penting NPWP dimiliki oleh wajib pajak dan cara pembuatan NPWP secara online

secaara bertahap. NPWP yang berhasil dibuat oleh para pelaku UMKM diharapkan dapat membangun citra yang positif dan dapat digunakan untuk membuat perijinan selanjutnya seperti NIB.

Faktor pendukung kegiatan sosialisasi dan pembuatan NPWP adalah Semangat atau antusiasme para peserta pelatihan. Dari tanya jawab yang dilakukan, dapat diketahui bahwa sebagian para peserta sudah memiliki usaha, ada pula peserta yang juga baru merintis usahanya. Untuk itu dalam memulai mengembangkan bisnis usahanya maka penting bagi para pelaku usaha untuk memiliki ijin usaha. Adapun faktor penghambat kegiatan pelatihan adalah ada beberapa peserta yang belum membawa kelengkapan data yang diperlukan untuk mengurus NPWP seperti surat rekomendasi dari suami bagi istri untuk mengurus NPWP pribadi, jaringan internet dan adanya keterbatasan waktu yang dimiliki pada saat kegiatan pelatihan.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kesiapan panitia memiliki nilai yang sangat baik. Dalam hal ini bahwa ketepatan waktu pada penyelenggaraan acara tersebut sesuai dengan jadwal. Kegiatan tersebut dimulai tepat pada pukul 12.30 sesuai dengan jadwal Selain itu dalam kegiatan tersebut panitia memberikan pelayanan ramah dan memuaskan. Pada kesiapan narasumber bahwa narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini langsung dari DJP Jatim 2. Hasil dari penilai survei terhadap kepuasan narasumber dapat disimpulkan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa narasumber menjelaskan materi dengan sangat baik. Media yang digunakan pun cukup mendukung dengan adanya LCD proyektor dan sound system yang memadai. Pemateri mengirimkan soft file materi 1 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Adapun kemampuan menjawab narasumber pada acara tersebut juga dinilai sangat baik. Terlihat dari antusias para peserta yang ingin terus bertanya kepada narasumber.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dikantor MWC Buduran Sidoarjo yang mana lokasi tersebut mudah dijangkau karena sudah terdeteksi pada google map. Selain itu ruangan yang luas yang berada dilantai 2 cukup nyaman digunakan selama acara berlangsung

Hasil dari kegiatan tersebut bahwa para pelaku usaha berhasil memiliki NPWP sebagai langkah awal untuk mengurus ijin usaha berikutnya. Hasil sosialisasi Diharapkan dengan memiliki legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat mengakses pembinaan dari Instansi

pemerintah terkait dan mengakses kredit dari perbankan[12]. Langkah awal ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik untuk meningkatkan kinerja UMKM.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pembedayaan pelaku UMKM di Asosiasi PC Fatayat NU Sidoarjo dalam hal sosialisasi dan pembuatan NPWP bagi para pelaku UMKM. Adapun kegiatan tersebut dilakukan bersifat pelatihan. Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan tersebut sebanyak 47 peserta. Hasil dari kegiatan tersebut yakni berupa pemahaman para pelaku UMKM di Asosiasi PC Fatayat NU Sidoarjo terkait dengan pentingnya pajak dan pembuatan NPWP bagi para pelaku UMKM. Adapun hasil survei kepuasan peserta terhadap kegiatan tersebut bahwa peserta sangat puas dengan adanya kegiatan tersebut. Kepuasan tersebut diukur baik dalam hal kesiapan panitia, kesiapan narasumber dan materi serta kesiapan lokasi kegiatan.

Adapun rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya yaitu penambahan kegiatan terkait ijin usaha berupa NIB, pengurusan P-IRT dan sertifikasi halal untuk skala produk UMKM. Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan perijinan yang diharapkan oleh para pelaku UMKM hal ini menunjukkan bahwa dengan memiliki ijin usaha akan membantu pelaku UMKM meningkatkan kinerja usahanya dan peningkatan branding usaha.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kegiatan yang telah dilaksanakan diucapkan terima kasih pada beberapa pihak terkait. Adapun pihak-pihak tersebut yaitu 1) DJP Jatim 2 yang sudah bersedia meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber pada kegiatan tersebut, 2) Asosiasi PC Fatayat NU Sidoarjo yang telah memberikan support terhadap seluruh peserta dan lokasi kegiatan, 3) Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 1. Pembukaan acara kegiatan



Gambar 2. Kegiatan pendampingan pelatihan pembuatan NPWP yang dipandu oleh DJP Jatim 2



Gambar 3. Kegiatan penutupan pelatihan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jabar.nu.or.id, "Sejarah Fatayat NU _ NU Online Jabar." 2022.
- [2] Pemerintah-Indonesia No. 20, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," no. 1, 2008.
- [3] Pemerintah Indonesia No. 07, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," no. 086507, pp. 1–121, 2021.
- [4] Peraturan Pemerintah No. 5, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko," no. 087293, 2021.
- [5] D. Arika and W. Fitri, "Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha Berupa Izin Usaha Mikro Kecil (Iumk) Melalui Layanan Online Single Submission (Oss) Di Moone By Dep," *Natl. Conf. Community Serv. ...*, vol. 3, 2021, [Online]. Available: <https://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/view/6061%0Ahttps://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/download/6061/19>

- 89.
- [6] Peraturan Pemerintah no.23, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu.” 2018.
- [7] D. L. Siregar, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor,” *Economicus*, vol. 14, no. 2, pp. 180–190, 2020, doi: 10.47860/economicus.v14i2.196.
- [8] M. S. Mintje, “Pengaruh Sikap, Kesadaran dan Pengatahuan terhadap kepatuhan wajib Pajak Orang pribadi pemilik (UMKM) dalam memiliki NPWP),” *J. EMBA*, vol. 4, no. 1, pp. 1031–1043, 2016.
- [9] R. Ardinugroho and Sekar Utami Setiastuti, “Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Aktivitas Perekonomian Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau,” p. 2021, 2021.
- [10] R. Anggraeni, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” *Eksaminasi J. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 77–83, 2021.
- [11] M. Hidayati, R. Kumala, W. Andayani, Ridwal, and Aldino, “Proses Pembuatan Npwp Cepat Dan Mudah Bagi Pelaku Umkm Di Masa Pandemi Covid-19,” vol. 5, no. 2, pp. 746–756, 2021.
- [12] M. T. Widayanto, A. Pujiastuti, A. Yatiningrum, Tumini, and U. Rahma Dhany, “Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *J. Abdimas Bina Bangsa*, vol. 1, no. 2, pp. 240–246, 2020, doi: 10.46306/jabb.v1i2.37.